

Strategi Pemerintah Dalam Pengelolaan Transportasi Publik di Kota Bandung

Ferdi Ramdhana¹, Nia Karniawati²

Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Indonesia

Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Indonesia

Kata Kunci :

Implementasi,
Kebijakan, TMB,
Kemacetan

ABSTRAK

Perkembangan Kota Bandung sebagai metropolitan dimulai dengan pertumbuhan wilayah sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung mengalami peningkatan jumlah penduduk yang berbanding lurus dengan pertumbuhan kendaraan. Titik kemacetan yang terjadi di Kota Bandung sebagai dampak dari banyaknya kendaraan yang memadati ruas jalan. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung menentukan arah kebijakan salah satunya dengan memperhatikan pengembangan transportasi publik melalui Peraturan Walikota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) pengoperasian Trans Metro Bandung. Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan program Trans Metro Bandung (TMB) dalam mengurai kemacetan di Kota Bandung Tahun 2022. Penelitian ini mencoba menganalisis implementasi kebijakan dari Trans Metro Bandung (TMB) dalam mengatasi kemacetan di Kota Bandung. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam disertai dokumentasi dengan Yudi Cahyadi, SP (Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung), Bagus Sugi Arif P. (Staf UPT Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bandung), Iwan (Petugas Teknis Trans Metro Bandung), Imam (Petugas Teknis Trans Metro Bandung), Bagus Abdurrachman, Maidina Hasna, Anggun Tamy, Sabila selaku masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi analisis dan interpretasi data, reduksi data dan penyajian data. Terdapat hasil Implementasi Program Kebijakan Trans Metro Bandung (TMB) Tahun 2022 tidak berjalan secara optimal karena manfaat kebijakan yang kurang dirasakan, belum menunjukkan derajat perubahan yang signifikan, sumber daya yang berperan kurang memadai, kepatuhan dan daya tanggap yang belum dilakukan secara keseluruhan serta strategi sosialisasi kebijakan yang tidak maksimal. Sebaiknya pemerintah dalam implementasi kebijakan program dapat menyeimbangkan dengan regulasi lain, memperbaiki sumber daya dan melakukan sosialisasi secara berkelanjutan.



Keyword :

Implementation,
Policy, TMB,
Congestion

ABSTRACT

The development of Bandung City as a metropolitan city began with the growth of the region as the capital of West Java Province. Bandung City experienced an increase in population that was directly proportional to the growth of vehicles. Congestion points that occurred in Bandung City were the impact of the large number of vehicles congesting the roads. Therefore, the Bandung City government determined the direction of policy, one of which was by paying attention to the development of public transportation through Bandung Mayor Regulation Number 704 of 2008 concerning Minimum Service Standards (SPM) for the operation of Trans Metro Bandung. This study discusses the implementation of the Trans Metro Bandung (TMB) program policy in reducing congestion in Bandung City in 2022. This study attempts to analyze the implementation of the Trans Metro Bandung (TMB) policy in overcoming congestion in Bandung City. The research was conducted using a qualitative approach. Data collection was obtained through in-depth interviews accompanied by documentation with Yudi Cahyadi, SP (Chairman of Commission C of the Bandung City DPRD), Bagus Sugi Arif P. (Staff of the Transportation UPT of the Bandung City Transportation Agency), Iwan (Technical Officer of Trans Metro Bandung), Imam (Technical Officer of Trans Metro Bandung), Bagus Abdurrachman, Maidina Hasna, Anggun Tamy, Sabila as members of the public. Data collection techniques include data analysis and interpretation, data reduction, and data presentation. There are results of the Implementation of the Trans Metro Bandung (TMB) Policy Program in 2022 that are not running optimally because the benefits of the policy are not felt, have not shown a significant degree of change, the resources involved are inadequate, compliance and responsiveness have not been carried out as a whole, and the policy socialization strategy is not optimal. It is recommended that the government in implementing the program policy can balance it with other regulations, improve resources and conduct socialization on an ongoing basis.

I. Pendahuluan

Kemacetan menjadi permasalahan utama di kota-kota besar, terutama jika tidak disertai dengan ketersediaan transportasi publik yang baik dan memadai. Kemacetan bisa terjadi akibat kurangnya infrastruktur jalan namun kepadatan penduduk semakin meningkat terutama yang terjadi di Kota Bandung. Kemacetan lalu lintas menjadi pemandangan sehari-hari masyarakat. Penumpukan kendaraan di jalan tidak mampu diimbangi oleh sarana dan prasarana lalu lintas yang setara dengan jumlah kendaraan berlalu lintas. Hal tersebut menyebabkan kendaraan menjadi terhambat dan kecepatan dalam berkendara turut melambat dan menghambat efisiensi waktu.

Dilansir pada berita Detik Jabar pada tanggal 23 September 2022, data menurut Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar mengatakan bahwa pertumbuhan kendaraan paling tinggi salah satunya terjadi di Kota Bandung yang mencapai 6.025.48 unit terhitung pada tahun 2014-2019. Angka tersebut menunjukkan adanya ketimpangan yang lebih tinggi antara banyaknya kendaraan dibandingkan dengan jumlah penduduk sebesar 2,5 juta jiwa. Dinas Perhubungan Kota Bandung menyebutkan bahwa ada dua puluh delapan (28) titik kemacetan yang terjadi di kota Bandung.





Maka hal tersebut dijadikan sebagai prioritas yang termuat pada sasaran target RPJPD 2018-2023. Menurut Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia pada tahun 2019 menyebutkan bahwa Kota Bandung berada di peringkat ke-14 sebagai kota termacet di Asia. Bandung menjadi salah satu kota termacet dengan menyalip Jakarta serta Surabaya. Adapun pada kajian Bapennas dan Bank Dunia menjelaskan bahwa tiga kota termacet se-Indonesia yaitu Jakarta, Bandung dan Surabaya. Bandung menjadi salah satu kota termacet dengan menyalip Jakarta serta Surabaya. Adapun pada kajian Bapennas dan Bank Dunia menjelaskan bahwa tiga kota termacet se-Indonesia yaitu Jakarta, Bandung dan Surabaya. Guna mencapai akuntabilitas pemerintah yang prima dalam mengurangi kemacetan maka melalui Dinas Perhubungan dilakukan pembenahan jalan. Pembenahan yang terjadi diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi Dinas Perhubungan sebagai kepanjangan kemajuan sistem Pemerintah Daerah yang memiliki tujuan guna memenuhi aspirasi dan merespon keresahan masyarakat khususnya di Kota Bandung yang memiliki tingkat kemacetan sangat tinggi.

Pada sisi lain, perluasan dan pengembangan area jalan di Kota Bandung cukup sulit dilakukan karena kepadatan penduduk yang melampaui 4 kapasitas, mendorong justifikasi bahwa transportasi publik diharapkan mampu menjadi solusi dari segala bentuk kemacetan yang terjadi di Kota Bandung akibat life style yang konsumtif. Rencana mengoptimalkan moda pengangkutan yang tinggi, transportasi publik diharapkan mampu memaksimalkan kapasitas sumber daya serta jaringan yang ada. Selain melakukan pembenahan jalan, salah satu upaya pemerintah Kota Bandung dalam mengurai kemacetan yang terjadi dengan memberikan pembaruan transportasi pelayanan publik bernama Trans Metro Bandung. Kendaraan yang bernama Trans Metro Bandung (TMB) tersebut merupakan penyedia transportasi umum yang beroperasi di Kota Bandung dengan lima puluh enam (56) titik pemberhentian. Rute jalan yang ditempuh oleh Trans Metro Bandung (TMB) mencakup wilayah Utara Kota Bandung dengan pemberhentian di daerah Sarimanis ke Selatan Kota Bandung dengan satu pemberhentian di lingkungan LPKIA. Adapun di wilayah Barat Kota Bandung, pemberhentian dilakukan di daerah Gunung Batu (Cimahi). Sedangkan titik pemberhentian wilayah Timur Kota Bandung berada di Pasar Induk (Gede Bage) Kota Bandung.

Saat ini, tuntutan masyarakat terhadap moda transportasi yang cepat, ekonomis, aman dan nyaman semakin berkembang. Hal tersebut selaras dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga transportasi yang ditawarkan saat ini tentu memiliki pengaruh besar. Pada sisi lain, masyarakat juga telah masuk pada era globalisasi, dimana selera serta harapan terhadap aktivitas mobilitas semakin jeli dan berkembang maka hal tersebut menjadi tolak ukur kepuasan masyarakat juga dalam memberikan pelayanan publik. Trans Metro Bandung (TMB) diciptakan guna mereformasi sistem angkutan perkotaan yang telah tersedia sebelumnya.





Inovasi tersebut bertujuan agar masyarakat mendapatkan akses transportasi yang layak, murah, terjangkau, tepat waktu, nyaman dan aman. Trans Metro Bandung (TMB) merupakan suatu angkutan umum yang dijadikan sebagai salah satu upaya pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam bidang transportasi darat di kawasan perkotaan sebagai pusat kemacetan. Trans Metro Bandung (TMB) berbasis bis yang mengganti sistem setoran menjadi sistem pelayanan (buy the service). Trans Metro Bandung memiliki sistem pemberangkatan bis secara terjadwal, berhenti pada halte khusus, nyaman, aman, ramah lingkungan dan terjangkau sebagaimana Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 158 ayat (1) dan (2).

Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan peraturan tersebut melalui aturan yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Perhubungan di Kota Bandung.

II. Tinjauan Pustaka

Teori Implementasi Van Meter dan Van horn yang biasa dikenal sebagai “Teori Top-Down” dan “Teori Bottom-Up”. Teori Top-Down, Teori ini menyoroti peran penting pihak-pihak di tingkat pemerintahan pusat atau lembaga kebijakan dalam mempengaruhi implementasi kebijakan di tingkat lokal. Fokusnya adalah pada arus informasi dan kontrol dari atas ke bawah. Pihak pusat dapat memberikan panduan, sumber daya, dan pengaruh untuk memastikan implementasi kebijakan sesuai dengan niat pembuat kebijakan. Berdasar pada teori top-down tersebut menurut teori George C. Edwards III ada 4 variable yang mempengaruhi, yaitu:

1) Komunikasi

Berjalannya suatu kebijakan public hingga mencapai titik keberhasilan pastinya pembuat kebijakan harus mengetahui apa yang akan dilakukan dengan jelas. Apabila tujuan dari kebijakan serta sasaran dari dibuatnya kebijakan belum di tahap yang jelas maka tidak akan tujuan tersebut tidak akan diketahui oleh sasaran dari kebijakan dan kemungkinan akan mendapatkan penolakan sehingga dibutuhkan komunikasi antara pembuat kebijakan dan sasaran kebijakan dengan tujuan yang jelas.

2) Sumberdaya

Keberhasilan dari dibuatnya sebuah kebijakan pastinya membutuhkan sumberdaya yang mengampuni atau berkualitas, entah itu sumberdaya material yang digunakan, sumber daya manusia ataupun metode penerapannya. Faktor penting agar kebijakan dapat di implementasikan dengan baik ialah sumber daya supaya kebijakan tersebut dapat berjalan dengan efektif maupun efisien.





3) Disposisi

Agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang dirancang oleh pembuat kebijakan maka implementor harus disposisi dengan baik. Keselarasan antara dua posisi tersebut sangat dibutuhkan agar prosesnya dapat dibuat sesuai dengan rancangan awal dan akan menjadi efektif dan efisien.

4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi mempunyai posisi dan peranan yang penting dalam pengimplementasian sebuah kebijakan. Agar suatu kebijakan akan berjalan dengan terstruktur dan sesuai dengan rancangan dibutuhkan prosedur operasi yang standar (SOP) agar menjadi sebuah tujuan dan pedoman bagi implementor dalam mengambil tindakannya.

III. Metodologi

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian dengan penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Cara yang digunakan untuk memperoleh data ialah berdasar pada studi literatur, data yang ada pada website pemerintah dan melalui peneliti terdahulu. Triangulasi data digunakan penulis untuk memvalidasi data yang ada dengan melakukan pengumpulan data, reduksi, penyajian dan menarik kesimpulan yang ada. Serta mengkaitkan teori dengan topik pembahasan diantaranya Teori Implementasi, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

IV. Hasil dan Diskusi

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan lapangan diperoleh hasil mengenai bagaimana Peran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung Dalam Mengembangkan Minat Baca Masyarakat Pada Program Gerobak Baca sebagai berikut;

a) Kepentingan yang mempengaruhi

Kebijakan Program Trans Metro Bandung merupakan program pelayanan transportasi publik yang disediakan untuk masyarakat Kota Bandung dan hingga saat ini masih terus berkembang untuk diintegrasikan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 704 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pengoperasian Trans Metro Bandung memuat bahwa program transportasi ini sebagai pilihan masyarakat dimana hasil usulan Pemerintahan Kota Bandung yang kemudian dilaksanakan melalui kewenangan Dinas Perhubungan Kota Bandung. Trans Metro Bandung juga merupakan program penambahan moda transportasi publik guna menanggulangi kemacetan serta penguatan perekonomian khususnya pada peningkatan PAD Kota Bandung. Hal ini diciptakan guna membantu masyarakat serta meringankan ongkos mobilitas di Kota Bandung.





Program Trans Metro Bandung lahir atas kebutuhan yang mendesak membutuhkan transportasi publik untuk menghubungkan mobilitas masyarakat Kota Bandung dari Timur ke Barat dan Utara ke Selatan yang kini memiliki jumlah kepadatan penduduk mencapai sekitar 3,5 juta beraktivitas pada siang hari di Kota Bandung.

b) Manfaat yang dihasilkan

Tipe manfaat yang dirasakan oleh masyarakat mulai dari respon yang diberikan dalam pemberlakuan program Trans Metro Bandung cukup baik dimana mampu menjangkau mobilisasi masyarakat dari Timur ke Barat dan Utara ke Selatan. Masyarakat juga bisa menggunakan fasilitas yang nyaman pada Trans Metro Bandung termasuk dengan tarif yang ekonomis. Trans Metro Bandung (TMB) dimanfaatkan oleh kalangan menengah kebawah diantaranya banyak digunakan oleh ibu-ibu dan pelajar. Berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : 551/Kep-024-Dishub/2019 Tentang Tarif Angkutan Umum Massal dan Tarif Khusus Pengguna E-Payment Buruh, Guru Honorer, Veteran, Pelajar Pengguna Trans Metro Bandung, Melalui Pembayaran E-Payment atas perubahan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 8 : 551.2/Kep.694-DISHUB/2008 Tentang Tarif Angkutan Umum Massal Bus Trans Metro Bandung bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pengoperasian angkutan Trans Metro Bandung, maka dilakukan penetapan tarif sebagai standar harga bagi pengguna jasa angkutan Trans Metro Bandung. Namun masih banyak masyarakat yang kurang memahami teknologi sehingga terlambat mengetahui informasi pelayanan sehingga pembayaran tiket kembali pada sistem konvensional.

c) Derajat perubahan yang diharapkan

Derajat perubahan yang ingin dicapai dengan adanya Trans Metro Bandung (TMB) ialah mobilitas masyarakat agar lebih mudah diprediksi sehingga dapat efektif pada sisi mobilitas dan waktu. Adapun perubahan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kendaraan pribadi menjadi pengguna transportasi publik, mengurangi kemacetan dan memberikan kemudahan terhadap masyarakat. Namun pada temuan di lapangan masih banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi publik sehingga kepadatan di jalan belum dapat terurai.

V. Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Trans Metro Bandung (TMB) dalam mengatasi kemacetan di Kota Bandung pada tahun 2022. Implementasi kebijakan Trans Metro Bandung (TMB) dalam mengatasi kemacetan secara keseluruhan dapat dikatakan tidak berhasil karena dari sembilan indikator hanya tiga yang berhasil dilaksanakan dan enam indikator lainnya tidak berjalan.





VI. Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Agusta, I. (2003). *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor, 27.
- Anderson, James E. (1970). *Public Policy Making*, New York: Reinhart and Wiston.
- Gumilang, G. S. (2016). Metode penelitian kualitatif dalam bidang bimbingan dan konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 2(2).
- Islamy, M. Irfan. (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kadir, Abdul. (2020). *Fenomena Kebijakan Publik dalam Perspektif Administrasi Publik di Indonesia*. Medan : CV Dharma Persada.
- Newman. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: 493). *Jurnal*
- Mappiare, A. (2009). *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif untuk Ilmu Sosial dan Profesi*. Malang: Jengala Pustaka Utama Bersama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang Media Informasi
- Syafiie, Inu Kencana. (2013). *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Putra, Wisma., dkk. (2022). *Suasana Bandung Hari Ini: Jalanan Padat, Tempat Publik Ramai*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d6002958/suasana-bandu-ng-hari-in-ijalanan-padat-tempat-publik-ramai>. (Diakses pada tanggal 14 Februari 2023)
- Winarno, Budi. (2002). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.

